

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Literatur

- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Brotodihardjo, R. Santoso. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Ishaq. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2005.
- Radbruch, Gustav. Einführung in die Rechtswissenschaft. Stuttgart: W. Kohlhammer, 1952.
- Rasjidi, Lili. Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu?. Bandung: Remadja Karya, 1988.
- Rawls, John. A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Saleh, Roeslan. Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Saidi, Muhammad Djafar. Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1990.

Van Hamel, J. Inleiding tot de Studie van het Nederlands Strafrecht. Haarlem:
Tjeenk Willink, 1940.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

C. Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2023/PN Jaksel
atas nama Terdakwa Achmad Yasier, 2023.

D. Artikel dan Jurnal

Kusuma, Ratna Indah. “Analisis Doktrin Penyertaan dalam Kejahatan
Korporasi: Relevansinya terhadap Hukum Pajak.” Jurnal Lex Crimen, Vol.
9 No. 6, 2020.

Muladi. “Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Hukum Pidana Modern.”

Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 14 No. 3, 1984.

Rahayu, Siti Kurnia. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak

Pidana Perpajakan di Indonesia.” Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum,

Vol. 6 No. 1, 2021.

Rahman, Denny. “Pendekatan Restoratif dalam Penegakan Hukum Pidana

Pajak.” Jurnal Hukum dan Bisnis Pajak, Vol. 5 No. 2, 2023.

Santoso, Bagus. “Reformasi Pemidanaan dalam KUHP Baru: Antara Asas

Legalitas dan Tujuan Keadilan.” Jurnal Ilmiah Hukum dan Sosial, Vol. 12

No. 1, 2024.

Wibowo, Adi. “Asas Legalitas dan Dinamika Penegakan Hukum Pidana

Ekonomi di Indonesia.”

Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 9 No. 2, 2022.

E. Sumber Daring

Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. “Pedoman Penegakan Hukum

Tindak Pidana Perpajakan.” Diakses dari <https://www.pajak.go.id>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Direktori Putusan: Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan Nomor 583/Pid.Sus/2023/PN Jaksel. Diakses dari

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.